

PENJABARAN APBD TAHUN 2026 - PERUBAHAN KEDUA

2026

PERBUP KAB BANGKA NO 10, BD 2026/ NO. 10, 7 HLM

PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengatur perubahan kedua atas penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan alokasi belanja wajib yang bersumber dari penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik dan penerimaan pajak rokok sesuai hasil evaluasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perubahan penjabaran APBD dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Bangka terkait penyesuaian pendanaan kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya, serta untuk memenuhi kebutuhan mendesak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian meliputi perubahan rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026; PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum; PP No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik; PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; PP No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku pada Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan; PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Perpres Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional; Perpres Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Negara tahun Anggaran 2026; Permendagri No 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; Permendagri No. 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dan Operasional; Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No. 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Perda Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kabupaten Bangka No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Perda Kabupaten Bangka No. 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; dan Peraturan Bupati Bangka No. 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Perbup ini mengatur tentang penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah guna mendukung kebutuhan pemerintahan serta pembangunan daerah. Perbup tersebut menjadi pedoman teknis bagi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran agar lebih efektif, efisien, dan sesuai prioritas pembangunan Kabupaten Bangka.

CATATAN : - Peraturan Bupati berlaku pada tanggal 8 April 2026 dan ditetapkan tanggal 8 April 2026.

- Lampiran : -